

---

## BAB I PENDAHULUAN

**P**emerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan misi ke 4 dari Visi dan Misi Bupati Padang Pariaman yaitu meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan pencapaian misi tersebut, maka perlu pertanggungjawaban atas kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja yang disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### A. GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, tanggal 11 November 2016. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Pemerintah daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah, dengan tugas pokok ***“Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten Padang Pariaman dibidang Pekerjaan Umum dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi”***. Dinas Pekerjaan



---

Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan Eselon II yang berada di bawah Pemerintah Daerah dan bertanggungjawab pada Bupati Padang Pariaman melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur, dengan Type A.

Adapun Tugas dan fungsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis dinas;
  - b. perumusan kebijakan umum bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - c. pengendalian pelaksanaan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam rangka mencapai target kinerja dinas;
  - d. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - e. pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
  - f. pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
  - g. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
  - h. koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/ atau



- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, memiliki jabatan struktural dan staf sebagaimana yang terlihat dalam tabel di bawah ini :

**TABEL 1.1**  
**STRUKTUR JABATAN MENURUT ESSELONERING**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

NO.	NAMA JABATAN	ESELONERING		
		ESELO N II	ESELON III	ESELO N IV
1.	Kepala Dinas	-		
2.	Sekretaris		1	
3.	Kepala Bidang Marga		1	
4.	Kepala Bidang Cipta Karya		1	
5.	Kepala Bidang SDA		1	
6.	Kepala Bidang Tata Ruang		1	
7.	Kasubag Umum dan Kepegawaian			1
8.	Kasubag Keuangan dan Aset			1
9.	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan			1
10.	Kasi Pemeliharaan Jaringan Jalan			1
11.	Kasi Pembangunan dan Peningkatan Jalan			1
12.	Kasi Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan			1
13.	Kasi Tata Bangunan			1
14.	Kasi Sanitasi dan Air Bersih			1
15.	Kasi Infrastruktur Lingkungan			1
16.	Kasi OP (Operasional dan Pemeliharaan) Irigasi			1
17.	Kasi Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Irigasi			1
18.	Kasi Pengelolaan Sungai Waduk dan Pantai			1
19.	Kasi Perencanaan Teknis Tata Ruang			1
20.	Kasi Pembinaan Teknis Tata Ruang			1



21.	Kasi Pemanfaatan Pengendalian Tata Ruang			1
22.	Operasional UPT Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Pengairan Wilayah I			2
23.	Operasional UPT Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Pengairan Wilayah II			2
24.	Operasional UPT Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Pengairan Wilayah III			2
25.	Operasional UPT Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Pengairan Wilayah IV			2
26.	Operasional UPT Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Pengairan Wilayah V			2
27.	Operasional UPT Peralatan dan Perbekalan			1
28.	Operasional UPT Laboratorium Pengujian Mutu Bahan dan Konstruksi			2
	<b>J U M L A H</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>28</b>

Sumber : SOTK Dinas PUPR Tahun 2017

Adapun komposisi PNS di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, sebagai berikut :

**Tabel 1.2**

**DAFTAR JUMLAH PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

<b>No</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Strata 2 (S-2)	12
2	Strata 1 (S-1)	33
3	Sarjana Muda / D3	6
4	SLTA	60
5	SLTP	14
6	SD	7
	<b>Jumlah</b>	<b>135</b>

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) DPUPR Tahun 2017



---

Ditinjau dari golongannya, komposisi PNS di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman adalah :

**Tabel 1.3**

**DAFTAR JUMLAH PNS BERDASARKAN TINGKAT GOLONGAN RUANG  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAA RUANG**

<b>No</b>	<b>Golongan Ruang</b>	<b>Jumlah</b>
1	IV	6
2	III	81
3	II	37
4	I	12
	Jumlah	135

**B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) DINAS PEKERJAAN  
UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. PADANG PARIAMAN**

Tantangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan permasalahan isu strategis diantaranya :

1. Masih tingginya tingkat kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi maupun infrastruktur pengendali daya rusak air, hal ini berpengaruh terhadap tingginya biaya pembangunan, operasional dan pemeliharaan yang harus dianggarkan
2. Belum terpadunya pengelolaan infrastruktur, baik untuk pengelolaan sumber daya air maupun penanganan sistem dan jaringan jalan kabupaten, kota, provinsi dan nasional
3. Masih banyak ditemui kendala pembebasan lahan dalam pembangunan infrastruktur sehingga menghambat upaya percepatan pembangunan infrastruktur
4. Masih rendahnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat serta swasta dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur
5. Masih rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan sampah dan drainase)
6. Belum optimalnya sistim perencanaan penyediaan air minum dan penanganan sampah serta terbatasnya pendanaan untuk



- 
- mendukung keseluruhan aspek penyediaan air minum dan pengelolaan sampah
7. Masih belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan serta kawasan pemukiman
  8. Masih terkendalanya legalisasi rencana tata ruang
  9. Masih ditemui pelaksanaan pembangunan tidak mengacu kepada Rencana Tata Ruang

### **C. SISTEMATIKA PELAPORAN**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Menginformasikan Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 menguraikan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Sistematika Pelaporan.

#### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017.

#### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

##### **A. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Menyajikan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai



---

dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

#### **B. Realisasi Anggaran**

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **Lampiran :**

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



---

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

---

**D**inas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 Melalui RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2016-2021 dengan komitmen yang kuat. Implementasi RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2017 merupakan tahun kedua dari periode Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Untuk mencapai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2017. Dan menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017. Target-target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017.

**Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017**

---

### A. RENCANA SRATEGIS

#### 1. Visi

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mengacu pada VISI 2016-2021, yaitu : **“Terwujudnya Pengembangan Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Tata Ruang melalui Dukungan Sarana dan Prasaran yang Handal untuk Kesejahteraan Masyarakat “.**

Makna VISI adalah :

1. Dalam pembangunan diwilayah kabupaten Padang





---

Pariaman diperlukan pemerataan pembangunan dimana akan terwujud pengembangan wilayah kabupaten secara menyeluruh.

2. Dalam pengembangan wilayah kabupaten berupa pembangunan infrastruktur dilakukan dengan memperhatikan perencanaan tata ruang kawasan sehingga pembangunan di wilayah kabupaten tertata dengan rapi.
3. Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur tetap memperhatikan pengendalian perusakan dan pencemaran lingkungan sekitar.
4. Pembangunan Infrastruktur dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

## **2. Misi**

Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :

1. Merencanakan ruang kawasan sesuai dengan potensi daerah dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan pembangunan infrastruktur ke-PU-an sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.
3. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat dan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan sekitarnya.
4. Mewujudkan pengembangan wilayah di kabupaten dalam rangka pemerataan pembangunan.

## **3. Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2017**

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :



**Tujuan :**

Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat agar tercipta kehidupan yang adil dan sejahtera.
2. Terbangunnya ruang kawasan diwilayah kabupaten yang terpadu dan berkesinambungan.
3. Terwujudnya pembangunan yang merata disegala segi kehidupan masyarakat.
4. Terciptanya lingkungan pemukiman yang sehat dalam mewujudkan kehidupan yang sehat bagi masyarakat.  
Terciptanya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan kelestarian lingkungan sekitarnya dengan memperhatikan kajian aspek pengendalian pencemaran / pengrusakan lingkungan.

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan	Menyediakan infrastruktur daerah yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Jalan Mantap</li> <li>• Persentase jembatan dengan kondisi baik</li> <li>• Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya</li> </ul>	Meningkatnya kualitas infrastuktur transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Jalan Mantap</li> <li>• Persentase jembatan dengan kondisi baik</li> <li>• Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ratio jaringan irigasi</li> </ul>	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ratio jaringan irigasi</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cakupan RT Pengguna air bersih</li> <li>• Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak</li> </ul>	Meningkatnya kualitas infrastruktur Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cakupan RT Pengguna air bersih</li> <li>• Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak</li> </ul>
	Terwujudnya ruang wilayah kabupaten yang aman,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jumlah kawasan strategis da cepat tumbuh</li> </ul>	Meningkatnya pemanfaatan kawasan startegis sesuai dengan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh</li> </ul>



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	nyaman dan berkelanjutan		perencanaan tata ruang	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah pelanggaran pemanfaatn ruang</li> <li>• Jumlah ketaatan terhadap RTRW</li> </ul>	Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah pelanggaran pemanfaatn ruang</li> <li>• Jumlah ketaatan terhadap RTRW</li> </ul>

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kab. Padang Pariaman maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kab. Padang Pariaman tahun 2017 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan pada tahun 2017, termasuk untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Bupati Padang Pariaman. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama DPUPR Kab. Padang Pariaman Tahun 2017 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (*outcome*) pelaksanaan program dan kegiatan DPUPR akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja DPUPR yang dituangkan dalam Laporan Kinerja. IKU DPUPR didukung oleh 5 Sasaran Strategis dengan 9 Indikator Kinerja.

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Padang Pariaman Tahun 2017, disajikan pada tabel berikut:



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>		
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase jalan Mantap</li> <li>• jembatan dengan kondisi baik</li> <li>• Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya</li> </ul>	58 76 35
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ratio jaringan irigasi</li> </ul>	42,55
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cakupan RT Pengguna air bersih</li> <li>• Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak</li> </ul>	80 67
4	Meningkatnya pemanfaatan kawasan startegis sesuai dengan perencanaan tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jumlah kawasan strategis yang dikembangkan</li> </ul>	7
5	Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah ketaatan terhadap RTRW</li> <li>• Jumlah pelanggaran pemanfaatn ruang</li> </ul>	12 1

### C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Bupati Padang pariaman yang mana telah ditetapkan melalui Peraturan tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun



---

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dituangkan dalam Laporan Kinerja.

(Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran 1).



---

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

**D**inas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama Tahun 2017. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **A. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian Capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara keputusan kepala LAN dan Peraturan Mendagri dimaksud dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal (%)	Predikat / Kategori
>100	Sangat berhasil
90<s.d≤100	Berhasil
80<s.d≤90	Cukup Berhasil
70<s.d≤80	Kurang Berhasil
≤70	Tidak berhasil

Sumber : Permendagri 54 th.2010 dan keputusan kepala LAN 293 th.2003 diolah



Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Target	Realisasi 2017	%
1	2	3		4		
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>				
01.	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Jalan Mantap</li> <li>Persentase jembatan dengan kondisi baik</li> <li>Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya</li> </ul>	55	58	57,75	99,56
			70	76	72	96%
			30	35	33	92,30
02.	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan	<ul style="list-style-type: none"> <li>ratio jaringan irigasi</li> </ul>	39,35	44	42,55	96,70
03	Meningkatnya kualitas infrastruktur Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cakupan RT Pengguna air bersih</li> <li>Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak</li> </ul>	70	81	80	97,10
			59	68	67	97,04
04	Meningkatnya pemanfaatan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>jumlah kawasan strategis yang dikembangkan</li> </ul>	5	9	7	75
05	Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah ketaatan terhadap RTRW</li> <li>Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang</li> </ul>	0	12	12	100
					1	



Dalam mengukur capaian kinerja menggunakan dua pendekatan, antara lain:

- 1). Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka rumus yang digunakan:

$$\text{Capaian kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2). Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian kinerja (\%)} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 :



**Sasaran 1:**

Meningkatnya kualitas infrastuktur transportasi

Dalam rangka Meningkatkan kualitas infrastuktur transportasi, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2017.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

1. Persentase Jalan Mantap
- 2. Persentase jembatan dengan kondisi baik
3. Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2017			
	Realisasi 2016	Target	Realisasi	%
Persentase Jalan Mantap	55	58	57,75	99,56





Persentase jembatan dengan kondisi baik	70	76	72	96
Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	30	35	33	92,30

Keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan berbagai pemangku kepentingan

Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan. Diantaranya :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kegiatan :

- Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Pembangunan jalan
- Pembangunan Jembatan
- Penilaian Kondisi Jalan
- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
- Pembangunan Jalan dan Jembatan ( Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Provinsi Tahun 2017

Pada Program Pembangunan Jalan dan Jembatan terdiri dari 5 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 150.138.536.800,- Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp. 147.477.217.155,- atau 92,23 %. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan.

2. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Kegiatan :

- Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK Penugasan Pendukung Konektifitas)
- Pemeliharaan rutin jalan
- administrasi DAK penugasan jembatan
- Administrasi DAK Penugasan Jalan



---

Pada Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan terdiri dari 5 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 41.328.000.000,- , Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp. 41.094.622.657,- atau 99,44 %. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan. Dari realisasi perbandingan tahun 2016 dan 2017 meningkat realisasinya sehingga persentase jalan mantap , pesentase jembatan dengan kondisi baik serta Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan target yang ditetapkan



Peningkatan Struktur jalan koto Mambang – sei. Asam



Pemeliharaan berkala jalan simpang Tabek – Kp.Ladang



Peningkatan kapasitas Struktur jalan pauhkambar – paritmalintang



Pembangunan Jembatan Guguak Kec. 2 X 11 Kayutanam

Peningkatan jalan Lurah Berkat Yakin Jalan DAU HOTMIC Paket II



Pekerjaan Agregat



Pekerjaan Aspal



Selesai pengaspalan



Core Dill



**Sasaran 2:**

Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan

Dalam rangka meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2017.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

1. ratio jaringan irigasi

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Capaian 2017		
		Target	Realisasi	%
ratio jaringan irigasi	39,35	44	42,55	96,70

---

Keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan berbagai pemangku kepentingan.

Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan. Diantaranya :

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.

Kegiatan :

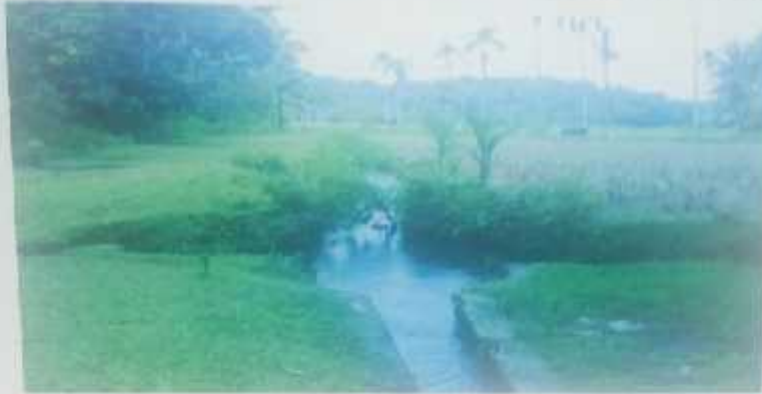
- Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
- Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
- Infrastruktur Irigasi (DAK Penugasan Pendukung Kedaulatan Pangan)
- Administrasi DAK Penugasan Pendukung Kedaulatan Pangan
- Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi Partisipatif (WISMP)
- Operasional dan Pemeliharaan (OP) Irigasi
- Peningkatan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Partisipatif (WISMP 2 Hibah)
- Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Propinsi tahun 2017

Pada Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya terdiri dari 8 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 24.415.130.000,- , Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp. 21.736.116.907,- atau 89,03 %. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan.

Adapun salah satu Irigasi yang sudah digunakan adalah



FOTO DOKUMENTASI IRIGASI D.I KP. TANJUNG SIKUCUR







DI. IRIGASI Kp. Sikucur V Koto Kampung dalam

## 2. Program Pengendalian Banjir

Kegiatan :

- Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
- Pada Program Pengendalian Banjir terdiri 1 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.661.106.500,- , Dari jumlah anggaran tersebut

direalisasikan sebesar Rp. 2.652.515.826,- atau 99,68%. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan.



### **Sasaran 3:**

#### **Meningkatnya kualitas infrastruktur Pemukiman**

Dalam rangka meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2017.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

1. Cakupan RT Pengguna air bersih
2. Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak

Keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan berbagai pemangku kepentingan

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2017			
	Realisasi 2016	Target	Realisasi	%
Cakupan RT Pengguna air bersih	70	81	80	97,10
Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	59	68	67	97,04

Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan. Diantaranya :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.  
Kegiatan :



- 
- Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Penyehatan Pemukiman
  - Penyusunan DED Air Bersih
  - Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Air Minum (DDUB)
  - Identifikasi Peta Jaringan Air Minum Padang pariaman
  - Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Air Minum ( DAK Penugasan )
  - Lanjutan Pamsimas

Pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, terdiri 6 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.155.099.000,- , Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp. 9.331.380.660,- atau 91,89%. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan

## 2. Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Kegiatan :

- Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
- DDUB Kawasan Kumuh Nelayan

Pada Program Program pembangunan infrastruktur perdesaan, terdiri dari 2 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.529.620.000,- Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp. 1.516.078.049,- atau 99,11 %. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan.

## 3. Program Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan

Kegiatan :

- Operasional Kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi (SANIMAS)
- Penyediaan Sarana Sanitasi (DAK Penugasan)
- Operasional Pelaksanaan Program PISEW/PPIP



---

Pada Program Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari 2 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.998.778.200,- Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp. 4.938.879.616,- atau 98,8 %. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan.

#### 4. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Kegiatan :

- Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- DED Drainase

Pada Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong terdiri dari 2 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.256.854.600,- Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp. 5.868.875.800,- atau 96,9 %. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan.

# FHOTO DOKUMENTASI CV. GIOTECH

Jln. Bahar Kamil Kel. Manggis Ganting Kota Bukittinggi

KEGIATAN	: PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DAN AIR MINUM (DAK PENERJARAN).
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN SPAM PADANG LARING NAGARI III KOTO AUR MALINTANG UTARA KEC. IV KOTO AUR MALINTANG
LOKASI	: KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
TAHUN ANGGARAN	: TAHUN 2017

## 4. PEK. JEMBATAN PIPA

0%



100%







#### **Sasaran 4:**

Meningkatnya pemanfaatan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang

Dalam rangka meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2017.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

1. Jumlah kawasan strategis yang dikembangkan

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2017			
	Realisasi 2016	Target	Realisasi	%
Jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh	5	9	7	75

Keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan berbagai pemangku kepentingan.

Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan. Diantaranya :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- Pembangunan gedung kantor
- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- Perencanaan Pembangunan Gedung

---

Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dari 3 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 44.521.547.000,- Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp. 42.737.311.590,- atau 95,99 %. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan.

## 2. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kegiatan :

- Pembangunan/peningkatan infrastruktur
- Pembangunan Mesjid Raya Padang Pariaman

Pada Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dari 2 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 14.542.400.000,- Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp. 12.682.187.000,- atau 87,21 %. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan.



### **Sasaran 5:**

**Meningkatnya Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang**

Dalam rangka meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2017.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

1. Persentase Ketaatan terhadap RTRW
2. Persentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Indikator Kinerja	Capaian 2017			
	Realisas 2016	Target	Realisasi	%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah ketatan terhadap RTRW</li> <li>• Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang</li> </ul>	0	12	12  1	100

Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan. Diantaranya :

1. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kegiatan :

- Operasional Pengendalian Tata Ruang

Pada Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dari 1 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp. 49883670,- atau 99,98 %. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan.

2. Program Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan :

- Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi
- Penyusunan KLHS Revisi RTRW
- Penyusunan Revisi RTRW
- Penyusunan RDTR dan KLHS

Pada Program Perencanaan Tata Ruang dari 4 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1565.000.000,- Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp. 1.563.673.095,- atau 99,92 %. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan.



Pada Jumlah ketaatan terhadap RTRW dan Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang kondisi tahun 2017 masih dalam rekomendasi hal ini disebabkan karena masih dalam pengukuran'

## B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak hanya terbatas pada APBD 2017, tetapi juga sumber pendanaan lainnya, baik dana dekonsentrasi, APBN Murni, lain maupun dana Tugas Pembantuan.

Realisasi keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017.

**Tabel 3.47. Realisasi anggaran 2017**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
A					
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2,288,555,000</b>	<b>2,183,378,934</b>	<b>105,176,066</b>	<b>95</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	56,000,000	55,945,000	<b>55,000</b>	99.9
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	94,000,000	66,212,366	<b>27,787,634</b>	70.44
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	481,235,000	456,020,000	<b>25,215,000</b>	94.76
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	48,520,000	48,520,000	<b>0</b>	100
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15,000,000	13,401,000	<b>1,599,000</b>	89.34
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30,000,000	16,692,000	<b>13,308,000</b>	55.64
7	Penyediaan makanan dan minuman	18,000,000	5,263,500	<b>12,736,500</b>	29.24
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	195,000,000	194,667,968	<b>332,032</b>	99.83



9	Penyediaan jasa Pendukung Perkantoran	860,800,000	849,600,000	<b>11,200,000</b>	98.7
10	Operasional UPT Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Pengairan Wilayah I *)	70,000,000	68,849,920	<b>1,150,080</b>	98.36
11	Operasional UPT Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Pengairan Wilayah II *)	70,000,000	68,595,670	<b>1,404,330</b>	97.99
12	Operasional UPT Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Pengairan Wilayah III *)	70,000,000	69,314,236	<b>685,764</b>	99.02
13	Operasional UPT Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Pengairan Wilayah IV *)	70,000,000	69,217,702	<b>782,298</b>	98.99
14	Operasional UPT Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Pengairan Wilayah V *)	70,000,000	68,387,072	<b>1,612,928</b>	97.7
15	Operasional UPT Peralatan dan Perbekalan*)	70,000,000	67,269,910	<b>2,730,090</b>	96.1
16	Operasional UPT Labolatorium Pengujian Mutu Bahan dan Konstruksi	70,000,000	65,422,590	<b>4,577,410</b>	93.46
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>44,814,522,000</b>	<b>42,986,967,824</b>	<b>1,827,554,176</b>	<b>96.92</b>
1	Pembangunan gedung kantor	31,340,000,000	30,501,229,100	<b>838,770,900</b>	97.32
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	62,975,000	62,975,000	<b>0</b>	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30,000,000	25,351,000	<b>4,649,000</b>	84.5
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	200,000,000	161,330,234	<b>38,669,766</b>	80.67
5	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	12,696,547,000	11,827,195,540	<b>869,351,460</b>	93.15
6	Perencanaan Pembangunan Gedung	485,000,000	408,886,950	<b>76,113,050</b>	84.31



<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>181,350,000</b>	<b>168,899,400</b>	<b>12,450,600</b>	<b>93.13</b>
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	57,000,000	49,112,800	<b>7,887,200</b>	86.16
2	Bimbingan Teknis Implementasi Program Ke PU an	124,350,000	119,786,600	<b>4,563,400</b>	96.33
<b>IV</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>282,100,000</b>	<b>236,508,491</b>	<b>45,591,509</b>	<b>83.84</b>
1	Penyusunan sistem informasi/data base jalan				
2	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	52,900,000	51,322,732	<b>1,577,268</b>	97.02
3	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Fisik <sup>^</sup>	40,000,000	0	<b>40,000,000</b>	0
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	59,000,000	58,706,207	<b>293,793</b>	99.5
5	Pengawasan Program Kegiatan Ke- PU an	130,200,000	126,479,552	<b>3,720,448</b>	97.14
<b>V</b>	<b>Program pembangunan jalan dan jembatan</b>	<b>150,138,536,800</b>	<b>147,477,217,155</b>	<b>2,661,319,645</b>	<b>98.23</b>
1	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	498,000,000	458,336,136	<b>39,663,864</b>	92.04
2	Pembangunan jalan	87,242,322,800	86270861760	<b>971,461,040</b>	98.89
3	Pembangunan jembatan	390,619,000	27,657,398,880	<b>-27,266,779,880</b>	97.95
4	Penilaian Kondisi Jalan	38,000,000	37,022,079	<b>977,921</b>	97.43
5	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	31,523,000,000	30,546,882,800	<b>976,117,200</b>	96.9
6	Pembangunan Jalan dan Jembatan ( Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Provinsi Tahun 2017)	2,600,000,000	2,506,715,500	<b>93,284,500</b>	96
<b>VI</b>	<b>Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</b>	<b>6,256,854,600</b>	<b>5,868,875,800</b>	<b>387,978,800</b>	<b>96.9</b>
1	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	6,194,954,600	5,812,997,900	<b>381,956,700</b>	93.83
2	DED Drainase	61,900,000	55,877,900	<b>6,022,100</b>	90.27



3	Penyusunan Dokumen DED Kawasan Kumuh dan Drainase	0	0	0	0
<b>VII</b>	<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</b>	<b>41,328,000,000</b>	<b>41,094,622,657</b>	<b>233,377,343</b>	<b>99.44</b>
1	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	5,000,000,000	5,000,000,000	0	100
2	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK Penugasan Pendukung Konektifitas)	31,987,000,000	31,845,057,000	<b>141,943,000</b>	100
3	Pemeliharaan rutin jalan	3,773,000,000	3,748,191,757	<b>24,808,243</b>	99.34
4	administrasi DAK penugasan jembatan	112,000,000	78,218,200	<b>33,781,800</b>	69.84
5	Administrasi DAK Penugasan Jalan	456,000,000	423,155,700	<b>32,844,300</b>	92.8
<b>VIII</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan</b>	<b>4,550,280,000</b>	<b>2,774,319,738</b>	<b>1,775,960,262</b>	<b>60.97</b>
1	Pengadaan alat-alat berat	1,635,600,000	0	<b>1,635,600,000</b>	0
2	Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	250,000,000	249,883,138	<b>116,862</b>	99.95
3	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	60,000,000	58,774,500	<b>1,225,500</b>	97.96
4	Operasional Pemberdayaan Alat Berat	2,504,680,000	2,374,739,800	<b>129,940,200</b>	94.81
5	Pengendalian dan Pengujian Mutu	100,000,000	90,922,300	<b>9,077,700</b>	90.92
<b>IX</b>	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya</b>	<b>24,415,130,000</b>	<b>21,736,116,907</b>	<b>2,679,013,093</b>	<b>89.03</b>
1	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	342,000,000	295,029,700	<b>46,970,300</b>	86.27
2	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	6,791,860,000	6,567,284,400	<b>224,575,600</b>	96.69
3	Infrastruktur Irigasi (DAK Penugasan Pendukung Kedaulatan Pangan)	11,659,570,000	9,384,412,000	<b>2,275,158,000</b>	80.49



4	Administrasi DAK Penugasan Pendukung Kedaulatan Pangan	343,000,000	341,815,719	<b>1,184,281</b>	99.65
5	Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi Partisipatif (WISMP)	692,400,000	680,131,274	<b>12,268,726</b>	98.23
6	Operasional dan Pemeliharaan (OP) Irigasi	1,513,700,000	1,510,483,842	<b>3,216,158</b>	99.79
7	Peningkatan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Partisipatif (WISMP 2 Hibah)	1,772,600,000	1,660,967,062	<b>111,632,938</b>	93.7
8	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Propinsi tahun 2017)	1,300,000,000	1,295,992,910	<b>4,007,090</b>	99.69
<b>X</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>	<b>10,155,099,000</b>	<b>9,331,380,660</b>	<b>823,718,340</b>	<b>91.89</b>
1	Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Penyehatan Pemukiman	138,500,000	113,461,060	<b>25,038,940</b>	81.92
2	Penyusunan DED Air Bersih	221,464,000	151,126,400	<b>70,337,600</b>	68.24
3	Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Air Minum (DDUB)	4,755,904,000	4,722,227,500	<b>33,676,500</b>	99.29
4	Identifikasi Peta Jaringan Air Minum Padang pariaman	0	0	<b>0</b>	0
5	Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Air Minum ( DAK Penugasan )	3,674,731,000	2,990,612,100	<b>684,118,900</b>	81.38
6	Lanjutan Pamsimas	1,364,500,000	1,353,953,600	<b>10,546,400</b>	99.23
<b>XI</b>	<b>Program Pengendalian Banjir</b>	<b>2,661,106,500</b>	<b>2,652,515,826</b>	<b>8,590,674</b>	<b>99.68</b>
1	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	2,661,106,500	2,652,515,826	<b>8,590,674</b>	99.68
<b>XII</b>	<b>Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>	<b>14,542,400,000</b>	<b>12,682,187,000</b>	<b>1,860,213,000</b>	<b>87.21</b>
1	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	4,412,200,000	4,010,849,280	<b>401,350,720</b>	90.9
2	Pembangunan Masjid Raya Padang Pariaman	10,130,200,000	8,671,337,720	<b>1,458,862,280</b>	85.6



<b>XIII</b>	<b>Program pembangunan infrastruktur perdesaan</b>	<b>1,529,620,000</b>	<b>1,516,078,049</b>	<b>13,541,951</b>	<b>99.11</b>
1	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	1,309,720,000	1,302,744,949	<b>6,975,051</b>	99.47
2	DDUB Kawasan Kumuh Nelayan	219,900,000	213,333,100	<b>6,566,900</b>	97.01
<b>XIV</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>1,565,000,000</b>	<b>1,563,673,095</b>	<b>1,326,905</b>	<b>99.92</b>
1	Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi	115,000,000	113,934,960	<b>1,065,040</b>	99.07
2	Penyusunan KLHS Revisi RTRW	100,000,000	99,948,370	<b>51,630</b>	99.95
3	Penyusunan Revisi RTRW	700,000,000	699,887,395	<b>112,605</b>	99.98
4	Penyusunan RDTR dan KLHS	650,000,000	649,902,370	<b>97,630</b>	99.98
<b>XV</b>	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	<b>50,000,000</b>	<b>49,883,670</b>	<b>116,330</b>	<b>99.98</b>
1	Operasional Pengendalian Tata Ruang	50,000,000	49,883,670	<b>116,330</b>	99.98
<b>XVI</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>137,500,000</b>	<b>0</b>	<b>137,500,000</b>	<b>0</b>
1	Penyusunan UKL dan UPL	137,500,000	0	<b>137,500,000</b>	0
<b>XVII</b>	<b>Program Sanitasi dan Pnyehatan Lingkungan</b>	<b>4,998,778,200</b>	<b>4,938,879,616</b>	<b>59,898,584</b>	<b>98.8</b>
1	Operasional Kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi (SANIMAS)	192,000,000	182,906,116	<b>9,093,884</b>	95.26
2	Operasional Pelaksanaan Program PISEW/PPIP	25,000,000	0	<b>25,000,000</b>	0
3	Penyediaan Sarana Sanitasi (DAK Penugasan)	4,781,778,200	4,755,973,500	<b>25,804,700</b>	99.46
		309,894,832,100	297,261,504,822	<b>12,633,327,278</b>	95.92



**A. Simpulan**

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Beberapa keberhasilan telah dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 adalah :

- 1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman telah dilaksanakan secara optimal melalui peningkatan kinerja dimasing-masing bidang yang ada.
- 2) Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap target RPJMD yang telah ditetapkan ada yang mencapai target dan ada yang tidak mencapai target, namun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
- 3) Realisasi anggaran belanja langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tahun 2017 sebesar 95,92% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Adapun dari kegiatan fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain :

- Telah dibangunnya Pembangunan gedung kantor pemerintahan di lingkungan kantor Bupati IKK.
- Pembangunan mejid raya Padang Pariaman yang dalam proses pembangunan
- Pembangunan Rehab makan syehburhanuddin
- Pembangunan Jalan DAK dilingkungan Kab. Padang Pariaman



- 
- Pembangunan Jembatan Campago di V Koto Kampung Dalam
  - Pembangunan drainase dan air minum disekitar lokasi masyarakat yang membutuhkannya.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2017 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2017 ini.

Permasalahan yang dihadapi terutama dalam pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya.

## **B. Langkah ke depan**

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Pencairan dana yang lebih awal sangat diperlukan sehingga kegiatan dapat dilakukan lebih awal dan dapat dilakukan semaksimal mungkin.
2. Perlu adanya pembinaan yang berkesinambungan agar program-program yang telah dilaksanakan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
3. Tetap melaksanakan koordinasi dengan *stakeholders* yang terkait dalam menjalankan program dan kegiatan.
4. Sangat diharapkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur agar pelaksanaan kegiatan dilapangan lebih terarah

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengharapkan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 dapat memenuhi kewajiban



---

akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, masyarakat maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017.

Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Parit Malintang,       Maret 2018  
KEPALA DINAS PUPR  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

**Ir. MUSWENDRY EYTES, Dipl.SE**

NIP. 19601214 199003 1 003

